



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

SIKAP INDONESIA TERHADAP PERANG DI GAZA

Aulia Fitri

Analisis Legislatif Ahli Muda
aulia.fitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan *High-Level Open Debate* pada 24 Oktober 2023 di Markas Besar PBB di New York mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk tentang konflik bersenjata Israel-Hamas. Hingga saat ini, Jalur Gaza masih digempur dengan serangan udara dan darat oleh pasukan Israel. Selain itu, Israel juga melakukan blokade total sehingga wilayah tersebut mengalami krisis listrik dan air bersih. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Kesehatan Palestina, konflik bersenjata tersebut telah menewaskan lebih dari 5000 warga Palestina.

Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, mendesak DK PBB untuk segera bertindak, dan menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina, serta mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Belum adanya aksi nyata dari DK PBB berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza, mengingat serangan yang dilakukan oleh Israel secara jelas mengabaikan hukum kemanusiaan internasional. Indonesia juga mengutuk keras berlanjutnya agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza. DK PBB memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, dengan tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang. DK PBB perlu bertindak secara nyata dalam menghentikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina.

Menlu Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional. Melalui OKI, ASEAN, dan pertemuan ASEAN-GCC, D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan. Pada forum DK PBB tersebut, Indonesia mendesak segera dilakukannya tiga tuntutan, yaitu seruan bersama untuk gencatan senjata segera, memprioritaskan akses kemanusiaan, dan kemanusiaan harus dikembalikan ke Dewan Keamanan.

Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah Negara Palestina dideklarasikan di Aljazair pada 15 November 1988. Sejak saat itu, melalui berbagai forum, termasuk PBB, OKI, dan GNB, Indonesia secara konsisten menyuarakan dan menegaskan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Terlebih saat ini dalam organisasi PBB, Indonesia memegang peranan strategis yaitu sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota Dewan HAM PBB.

Indonesia juga termasuk negara-negara yang telah memberikan suara dukungan, sehingga Palestina dapat menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011, dan memperoleh status "negara" (*non-member observer state*), dari sebelumnya hanya berstatus "entitas" (*non-member observer entity*), dalam keputusan Sidang Majelis Umum PBB pada 29 November 2012.

Indonesia juga telah membangun Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Palestina, yang diresmikan pada 27 Desember 2015 oleh Wakil Presiden Indonesia saat itu, Jusuf Kalla. Keberadaan Rumah Sakit Indonesia di Palestina adalah bukti dukungan rakyat Indonesia untuk rakyat Palestina. Namun, saat ini RSI tidak dapat berfungsi secara optimal akibat serangan udara oleh Israel.

Bagi Indonesia dukungan terhadap Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Atensi DPR RI

Komisi I DPR telah mengecam keras serangan Israel terhadap Palestina sebagai kejahatan kemanusiaan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR dapat mendorong Kemenlu RI dalam beberapa hal berikut. *Pertama*, bersama seluruh negara di dunia untuk menerapkan resolusi DK PBB, dengan mempertimbangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. *Kedua*, mendesak resolusi tegas PBB guna menghentikan segala pelanggaran HAM di Palestina. *Ketiga*, melalui forum DK PBB menyerukan untuk menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel.

Selanjutnya, *keempat*, memastikan keamanan WNI yang berada di kawasan konflik, baik di Gaza maupun Tepi Barat, baik WNI sipil yang berada di Gaza, maupun militer yang sedang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon yang berbatasan dengan Palestina. *Kelima*, mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk terus konsisten berpegang teguh pada amanat konstitusi yang menentang berbagai bentuk penjajahan di muka bumi, dan terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Sumber

cnbcindonesia.com, 25 Oktober 2023;
dunia.tempo.co, 26 Oktober 2023;
international.sindonews.com, 27 Oktober 2023;
kemlu.go.id, 25 Oktober 2023;
tribunnews.com, 26 Oktober 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023